

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengembangkan hubungan dengan hampir semua negara di Kepulauan Pasifik / *Pasific Island Country* (PIC)<sup>1</sup>, dalam hal ini secara spesifik adalah negara-negara di Pasifik Selatan hal ini didasari oleh letak geografis dan karakteristik kedua negara.<sup>2</sup> Hubungan yang terjalin terhitung ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia.<sup>3</sup> Indonesia memperkuat hubungannya dengan bergabung dalam *Pasific Island Framework for Regional Cooperation* tahun 2009.<sup>4</sup>

Tahun 1965 hubungan Indonesia dengan PIC mengalami inkonsistensi, dilatarbelakangi oleh karena adanya gerakan separatisme yang dilakukan Papua Barat. Banyaknya negara PIC yang menyuarakan isu Papua Barat karena memiliki kesamaan ras dengan masyarakat di Papua Barat yakni *Melanesia*. Pertama kali disuarakan oleh Vanuatu pada sidang Majelis Umum Perserikatan

---

<sup>1</sup> The Jakarta Post, "RI and the Pacific: A History of Cooperation" (2016, December 2). Accessed November 1, 2023, at <http://www.thejakartapost.com/adv/2016/12/02/ri-and-the-pacific-a-history-of-cooperation.html>

<sup>2</sup> Arto Suryodipuro, "Building Relations with Pacific Islands Countries, The Jakarta Post. (2014, January 25). Accessed November 1, 2023 at <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/building-relations-with-pacific-island-countries.html>

<sup>3</sup> Saltford, John. *The United Nations and The Indonesian Take Over of West Papua, 1962-1969*. London: RoutledgeCurzon, 2003.

<sup>4</sup> Yanuar Pribadi. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2021: 78

Bangsa-Bangsa (PBB) ke-68, kemudian oleh Kepulauan Solomon.<sup>5</sup> Dan Vanuatu menjadi tuan rumah pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) sebagai grup pergerakan kemerdekaan yang menaungi beberapa organisasi kemerdekaan Papua Barat. Hubungan antara Indonesia dan PIC telah menunjukkan adanya tantangan yang harus diselesaikan, Indonesia mengupayakan cara *soft diplomacy* dalam pendekatan kepada PIC. Indonesia membangun citra sebagai negara donor yang responsif dan peduli dengan tantangan kawasan.<sup>6</sup>

Keterlibatan Indonesia sebagai negara donor pada bantuan luar negeri didasari pada perubahan status Indonesia dalam hal pembangunan ekonominya. Pada 1 Juli 2023, World Bank merilis data mengenai perubahan status Indonesia yang sebelumnya sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah (*lower-middleincome country*) dan selama ini berperan sebagai negara penerima bantuan atau *beneficiary*.<sup>7</sup> Berubah menjadi negara berpendapatan menengah atas atau *Upper Middle-Income Country* (UMIC), hal ini berdasarkan *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% dari USD 4.170 menjadi USD 4.580 di 2022.<sup>8</sup> Hal ini berdampak pada proses

---

<sup>5</sup> May, Ronald. "The Melanesian Spearhead Group:: testing Pacific island solidarity." *Australian Strategic Policy Institute*, 2011: 6-9.

<sup>6</sup> Website Resmi Kementerian Luar Negeri. "Indonesia Berikan Bantuan Pelatihan Kepolisian Dukung Tuvalu Selenggarakan KTT PIF Ke-50". 22 Juli 2019. Diakses pada tanggal 28 Juli 2020 dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/475/berita/Indonesia-berikan-bantuan-pelatihan-kepolisian-dukung-tuvalu-selenggarakan-ktt-pif-ke-50>

<sup>7</sup> Yanuar Pribadi. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2021: 72.

<sup>8</sup> Surjantoro, Deni. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. 2 Juli 2023. Diakses pada tanggal 23 November 2023 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Pulih-Kuat-dari-Pandemi.-Indonesia-Kembali-Naik>

birokrasi yang membutuhkan waktu sehingga menyebabkan beberapa kendala, baik dalam proses pengalokasian anggaran maupun kegagalan realisasi penyaluran bantuan tersebut.<sup>9</sup> Meskipun demikian, upaya Indonesia untuk memberikan bantuan luar negeri mencerminkan komitmennya untuk memainkan peran penting dalam pengembangan kawasan Pasifik, yang konsisten dengan posisinya sebagai *emerging power* dan *emerging market* secara global.<sup>10</sup> Ini membuat Indonesia memiliki dua peran: sebagai penerima bantuan internasional dan sebagai pemberi bantuan internasional untuk negara berkembang lainnya. Langkah Indonesia dalam menjadi negara donor dilakukan melalui Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang berfokus pada menyediakan bantuan internasional untuk negara berkembang lainnya.

Mendukung kepentingan Indonesia dalam aspek bantuan luar negeri, pemerintah Indonesia meresmikan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Agency for International Development (Indonesian Aid)* yang secara khusus mengurus bantuan luar negeri lembaga ini dibentuk dibawah kementerian keuangan.<sup>11</sup> Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah membentuk *Indonesian Aid* untuk mengelola Bantuan Pembangunan Resmi/ *Official Development Assistance (ODA)* dan kerja sama

---

<sup>9</sup> Kurniadi T. "Implementasi Pemberian Hibah Pemerintahan Indonesia kepada Pemerintah/Lembaga Asing sebagai Stimulus *Soft Diplomacy*." Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2020: 01-14.

<sup>10</sup> Kurniadi T. "Implementasi Pemberian Hibah Pemerintahan Indonesia kepada Pemerintah/Lembaga Asing sebagai Stimulus *Soft Diplomacy*." Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2020: 01-14.

<sup>11</sup> Indonesia, Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia dalam Diplomasi. Centre for Policy Analysis and Development on Asia-Pacific and African Regions Policy Analysis and Development Agency Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Jakarta: P3K2 Aspasaf, 2013.

pembangunan internasional, tugas *Indonesian Aid* ialah mengelola dana kerja sama pembangunan Internasional (*endowment fund*) dan biaya operasional *aid* Indonesia.<sup>12</sup> Kedua, mengelola investasi, hibah, kemitraan, serta *monitoring* dan evaluasi program bantuan hal ini berdasarkan arahan Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan melalui Direktorat Investasi dan Penanganan Dana.<sup>13</sup> Pemberian ODA dari negara berkembang ini berdasarkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan bentuk “donor baru” dimana *middle income countries* (MICs) telah mengambil peran sebagai kontributor sebagai negara donor non-tradisional, di mana selain menerima juga bisa memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya.

Pengalokasian dana *Indonesian Aid* pada 2019-2022 terbagi pada beberapa program di antaranya, *International Workshop on Disaster Risk Management*, pelatihan *International South Pacific-Indonesia Entrepreneurship Camp: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals* (SDGs) 2019, *Protocol Training in Tuvalu* 2019, dan pembangunan *Regional Agriculture Training Center* di Fiji. Pada tahun 2024, Kementerian Bidang Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap

---

<sup>12</sup> Indonesia, Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia dalam Diplomasi. Centre for Policy Analysis and Development on Asia-Pacific and African Regions Policy Analysis and Development Agency Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Jakarta: P3K2 Aspasaf, 2013.

<sup>13</sup> Yanuar Pribadi. "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2021: 78.

negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.<sup>14</sup> Rincian dari total anggaran tersebut yaitu Rp 20 miliar dipergunakan untuk peningkatan citra Papua, Rp 15 miliar untuk peningkatan kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan, Rp 15 miliar untuk peningkatan kerja sama Organisasi Internasional Pasifik Selatan, Rp 5 miliar dipergunakan untuk pengelolaan keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan, dan Rp 5 miliar digunakan untuk peningkatan kerja sama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan.

Dapat dilihat bagaimana Indonesia memprioritaskan hubungan dengan negara kawasan dalam meningkatkan kerja sama pembangunan. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 4,6% pada 2023, naik dari 3,9% pada 2022, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi intra regional. Meskipun Indonesia telah menjadikan negara kepulauan Pasifik sebagai target yang besar, upaya memperluas kerja sama tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, negara kepulauan Pasifik ini tetap tidak menempatkan Indonesia pada prioritas kerja sama mereka, dan sentimen terhadap isu separatisme Papua yang bertentangan dengan kepentingan Indonesia meskipun Indonesia sudah memberikan bantuan.

## 1.2 Rumusan masalah

Hubungan kerja sama Indonesia dengan negara Kepulauan Pasifik masih belum stabil, hal ini terkait urgensi pada isu separatisme Papua yang

---

<sup>14</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perkuat Terwujudnya ‘Diplomasi Tangan di Atas’, Kemensetneg Gelar Peluncuran Laporan Tahunan KSS. 19 November 2019. Diakses pada tanggal 30 November 2023 [https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat\\_terwujudnya\\_diplomasi\\_tangan\\_di\\_atas\\_kemensetneg\\_gelar\\_peluncuran\\_laporan\\_tahunan\\_kss](https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat_terwujudnya_diplomasi_tangan_di_atas_kemensetneg_gelar_peluncuran_laporan_tahunan_kss)

selalu dibahas oleh negara-negara Kepulauan Pasifik. Terlepas dari hambatan tersebut Indonesia terus melakukan pendekatan-pendekatan salah satunya adalah dengan memberikan bantuan Pembangunan Internasional, dan ditahun 2019 Indonesia semakin terorganisir melalui kelembagaan dengan pembentukan *Indonesian Aid*. Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional di kawasan tersebut. Indonesia berupaya memproyeksikan kepemimpinan dan pengaruhnya di kepulauan Pasifik, khususnya melalui kegiatan pembangunan dan bantuan luar negeri bagi negara-negara di kawasan tersebut melalui *Indonesian Aid*.

Upaya Indonesia untuk bisa menjalin kerja sama yang baik dengan Kepulauan Pasifik ini ditandai oleh Indonesia menjadikan kawasan ini sebagai salah satu prioritas mereka, terlepas dari upaya Indonesia memberikan pendekatan-pendekatan, negara Kepulauan Pasifik masih belum menunjukkan keseriusannya menjalin kerja sama dengan Indonesia dan lebih memprioritaskan hubungan dengan negara-negara besar hal ini diperburuk dengan isu separatisme masih di gaungkan secara masif oleh beberapa negara-negara Kepulauan Pasifik. Fakta ini mendukung kekawatiran Indonesia dalam melihat PIC, pendekatan yang dilakukan Indonesia belum membuat PIC memberikan perhatian lebih pada Indonesia.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti adalah, bagaimana

kerja sama pembangunan internasional Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan melalui *Indonesian Aid*?

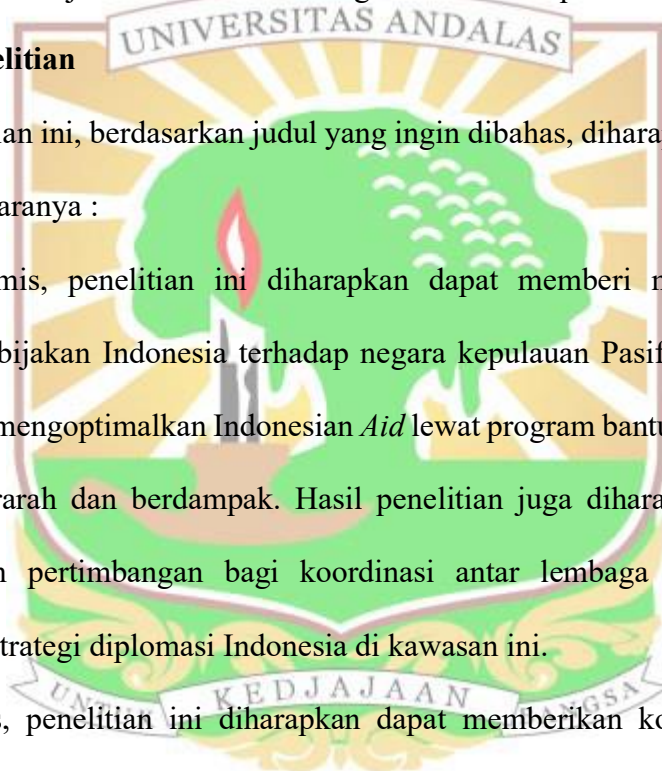
#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *Indonesian Aid* dalam kerja sama pembangunan internasional Indonesia dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik, dengan menerapkan perspektif *emerging donors* dalam menilai kinerja *Indonesian Aid* sebagai instrumen diplomasi Indonesia.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan judul yang ingin dibahas, diharapkan memberi manfaat di antaranya :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pembuatan kebijakan Indonesia terhadap negara kepulauan Pasifik, khususnya terkait upaya mengoptimalkan *Indonesian Aid* lewat program bantuan luar negeri yang lebih terarah dan berdampak. Hasil penelitian juga diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi koordinasi antar lembaga terkait untuk merumuskan strategi diplomasi Indonesia di kawasan ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya terkait penerapan perspektif *emerging donors* dalam menganalisis peran lembaga bantuan luar negeri sebagai instrumen diplomasi suatu negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi bagi kajian akademik mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan kepulauan Pasifik, terutama dilihat dari variabel bantuan pembangunan internasional yang disalurkan.



## 1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka ialah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penulisan studi pustaka/teks diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*prelimanry research*) untuk memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Dalam menjawab penelitian mengenai peran *Indonesian Aid* dalam meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara Kepulauan Pasifik, peneliti menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Studi pustaka yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Artikel jurnal berjudul “*The Impact China And Western Donors Have Had On Africa To Ensure The Effectiveness Of Foreign Aid*” oleh Raveena Parbhoo, artikel jurnal ini menganalisis secara menyeluruh dampak bantuan luar negeri dari Tiongkok dan donor Barat terhadap pembangunan di Afrika, dengan penekanan khusus pada seberapa efektif bantuan tersebut. Bantuan luar negeri, yang melibatkan transfer sumber daya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, sangat penting untuk kerja sama pembangunan di seluruh dunia. Meskipun Afrika telah menerima banyak paket bantuan selama bertahun-tahun, benua tersebut masih menghadapi banyak masalah



pembangunan, yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif bantuan tersebut.<sup>15</sup>

Artikel jurnal ini secara khusus membandingkan cara Tiongkok sebagai donor baru melakukan bantuan ke Afrika dengan cara donor Barat konvensional. Tiongkok dikenal dengan pendekatan bantuan tanpa syarat politiknya, sementara donor Barat sering meminta tata kelola dan hak asasi manusia. Perbedaan dalam metode ini memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa efektif bantuan dan bagaimana hal itu berdampak pada pembangunan di negara-negara penerima. Jurnal ini mengidentifikasi beberapa komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan bantuan di Afrika, seperti kejelasan, tanggung jawab, dan kemampuan manajemen. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan secara keseluruhan, transparansi dalam pembagian dan penggunaan bantuan sangat penting. Studi ini juga menyoroti perdebatan berkelanjutan tentang efektivitas bantuan, menyajikan pandangan berbeda dari para ekonom terkemuka seperti Jeffrey Sachs, William Easterly, dan Dambisa Moyo.

Karena Tiongkok cenderung mempertahankan kontrol atas kegiatan yang didanainya dari awal hingga akhir proyek, bantuan Tiongkok sering dianggap lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi keberlanjutan metode ini dan konsekuensi geopolitiknya menimbulkan pertanyaan. Sementara itu, metode donor Barat yang lebih berfokus pada reformasi tata kelola dan pengembangan institusi dianggap penting untuk

---

<sup>15</sup> Parbhoo, Raveena. "The Impact China And Western Donors Have Had On Africa To Ensure The Effectiveness Of Foreign Aid"." *Journal of Romanian Literary Studies*, 2023: 881-891.

pembangunan jangka panjang, meskipun negara penerima terkadang menganggapnya terlalu preskriptif. Selain itu, jurnal ini membahas peran yang dimainkan oleh berbagai lembaga donor, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, dan Uni Eropa, dalam mendukung pembangunan Afrika. Studi ini menekankan bahwa evaluasi terus menerus sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif bantuan dan bagaimana mengubah strategi bantuan berdasarkan hasilnya.

Merujuk pada kerja sama pembangunan internasional di Kepulauan Pasifik, analisis dalam jurnal ini menawarkan beberapa analisis untuk membandingkan metode bantuan berbagai donor di Kepulauan Pasifik, Anda dapat mengubah kerangka analisis komparatif yang digunakan dalam jurnal ini. Ini bisa mencakup menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan, serta menemukan elemen khusus yang mempengaruhi efektivitas bantuan dalam konteks Kepulauan Pasifik. Anda juga dapat melihat bagaimana berbagai donor menyeimbangkan pemberian tanpa syarat dengan upaya mendorong tata kelola yang baik di negara-negara Kepulauan Pasifik. Selain itu, studi tentang bagaimana negara-negara penerima di wilayah ini melihat bantuan efektif dapat memberikan informasi bermanfaat. Evaluasi dampak jangka panjang bantuan luar negeri terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara Kepulauan Pasifik, serta analisis peran organisasi regional dalam koordinasi dan implementasi bantuan, dapat menjadi kontribusi signifikan.

Analisis yang baru dapat memberikan pemahaman baru tentang dinamika bantuan luar negeri di wilayah tersebut dengan menerapkan metodologi dan kerangka analisis dari jurnal ini ke konteks Kepulauan Pasifik. Hal ini tidak hanya akan memperkaya literatur tentang efektivitas bantuan di berbagai konteks geografis, tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan yang bekerja di wilayah Pasifik.

Penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Indonesia Meredam Isu Papua : Analisis Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Tiga Negara Pasifik Selatan (Fiji, Kep. Solomon, dan Vanuatu) Tahun 2015-2019” ditulis oleh Bima Bramasta, Praja Firdaus Nuryananda penelitian ini pada dasarnya ingin menganalisis strategi Indonesia dalam meredam kritik atas isu Papua dari sejumlah negara di Pasifik, khususnya Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon.<sup>16</sup>

Strategi utama yang diangkat adalah dengan menggunakan bantuan luar negeri sebagai instrumen diplomasi untuk mempengaruhi ketiga negara tersebut. Bantuan luar negeri ini diimplementasikan melalui skema Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (KSST). Akan tetapi, fokus pembahasan jurnal ini terasa melompat-lompat dan kurang fokus. Di satu sisi penulis menyebut isu Papua berpotensi merugikan Indonesia dan memberi pembenaran kelompok separatis. Namun di sisi lain, penulis sama sekali tidak menguraikan lebih

---

<sup>16</sup> Bima Bramasta, Praja Firdaus Nuryananda. "Strategi Pemerintah Indonesia Meredam Isu Papua Analisis Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Tiga Negara Pasifik Selatan (Fiji, Kep. Solomon, dan Vanuatu) Tahun 2015-2019." *Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference*, 2021: 60-65.

jauh apa saja kerugian nyata bagi Indonesia dan bagaimana isu ini dimanfaatkan kelompok separatis. Juga tidak dijelaskan motivasi sesungguhnya Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Solomon mengkritisi isu Papua. Apakah semata alasan politik, atau ada faktor lain seperti persaingan pengaruh kawasan Asia Pasifik

Walaupun disebutkan rentang waktu penelitian dari 2015-2019 saat isu Papua mulai ramai dikritik, contoh implementasi bantuan Indonesia yang dikemukakan penulis sebagian besar justru terkait bencana alam di Fiji dan Vanuatu pada 2016 dan 2015. Sangat minim contoh konkret program bantuan Indonesia dalam rangka meredam isu Papua. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah benar bantuan Indonesia pada 2015-2019 dipengaruhi oleh dinamika isu Papua atau tidak. Data yang dikemukakan penulis belum cukup kuat untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang dapat disarankan adalah dengan melakukan pendalaman data dan contoh skema bantuan Indonesia ke Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Solomon khusus terkait upaya meredam isu Papua. Misalnya berapa alokasi anggaran untuk program tersebut, bidang apa saja yang didanai, serta bagaimana dampaknya terhadap opini publik dan posisi pemerintah ketiga negara soal Papua. Dengan demikian bukti empiris yang dihadirkan akan jauh lebih konkret.

A

dapun relevansi topik jurnal ini dengan rencana penelitian skripsi Saudara tentang *Indonesian Aid* dalam kerangka diplomasi Indonesia-Pasifik adalah memberi

latar belakang mengapa bantuan luar negeri menjadi penting. Juga bagaimana bantuan luar negeri bisa menjadi instrumen diplomasi yang efektif. Namun perlu lebih difokuskan pada data dan contoh kasus *Indonesian Aid* yang memang ditujukan untuk negara-negara Pasifik, bukan skema bantuan kemanusiaan akibat bencana alam. Dengan menyempurnakan fokus dan data pendukungnya, penelitian tentang penerapan *Indonesian Aid* sebagai soft power diplomacy Indonesia ke negara kepulauan Pasifik dapat menjadi lebih komprehensif dan berkontribusi bagi pengayaan kajian Hubungan Internasional Indonesia.

Dalam artikel jurnal berjudul "*Lack of foreign aid effectiveness in developing countries between a hammer and an anvil*" Moosa Elayaha, diterbitkan oleh *Centre for International Development Issues Nijmegen* (CIDIN) tahun 2016, artikel ini memberikan analisis komprehensif mengenai kurangnya efektivitas intervensi bantuan luar negeri di negara berkembang, dengan fokus pada Yaman, Mesir, dan Jordania. Artikel mendalami alasan di balik ketidakefektifan tersebut dan mengeksplorasi sudut pandang yang bertentangan antara *Public Interest Perspective* (PIP) dan *Public Choice Perspective* (PCP).<sup>17</sup>

PIP berpendapat bahwa bantuan luar negeri diperlukan untuk menutupi kesenjangan pendanaan guna investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara PCP berpendapat bahwa bantuan justru berkontribusi pada kegagalan pembangunan akibat korupsi dan kesalahan pengelolaan. Artikel juga menghadirkan pandangan para ekonom seperti William Easterly yang

---

<sup>17</sup> Elayah, M. "Lack of foreign aid effectiveness in developing countries between a hammer and an anvil." *Contemporary Arab Affairs*, 2016: 82-99.

mengkritik program-program bantuan luar negeri karena dampaknya yang terbatas pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Artikel diakhiri dengan mengajukan penjelasan ketiga untuk ketidakefektifan bantuan luar negeri yang melampaui cakupan PCP.

Selain itu, artikel membahas hubungan antara bantuan luar negeri dan pembangunan di negara berkembang, menyoroti isu seperti kepentingan negara donor, peran birokrat dalam program bantuan, dan kurangnya pengetahuan lokal di kalangan para ahli dan pegawai yang terlibat dalam program bantuan. Artikel menekankan bahwa program bantuan luar negeri sering kali tidak efektif akibat lingkungan korup, orientasi berat sebelah dari para ahli asing, dan kurangnya pemahaman atas konteks lokal.

Data yang disajikan menunjukkan bahwa bantuan luar negeri sejauh ini gagal meningkatkan pertumbuhan secara efektif di negara penerima bantuan. Faktor seperti korupsi, kelemahan kebijakan, dan kerapuhan institusi di negara penerima menjadi penyebab rendahnya efektivitas. Studi juga menyoroti dampak negatif dari kebijakan rezim otoriter di negara penerima yang justru menghambat upaya pembangunan dan mempertahankan kemiskinan dan kerumitan yang melingkupi bantuan luar negeri di negara berkembang.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Foreign aid, Cashgate and trusting relationships amongst stakeholders: key factors contributing to (mal) functioning of the Malawian health system*, oleh R. Adhikari, J. Sharma, Pam Smith, A. Malata ini memberikan sudut pandang baru dalam kajian bantuan

pembangunan dan sistem kesehatan di negara berkembang.<sup>18</sup> Fokus kajiannya adalah Malawi, sebuah negara miskin di Afrika yang sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan dasar, termasuk kesehatan. Namun yang menarik, meskipun telah menerima banyak sekali bantuan luar negeri, kemajuan di sektor kesehatan Malawi tetap lambat. Melalui metode kualitatif mendalam, jurnal ini berupaya mengungkap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi (tidak efektifnya) fungsi sistem kesehatan di Malawi.

Titik tolak analisis jurnal ini adalah skandal korupsi besar *Cashgate* tahun 2013 yang mengguncang pemerintah dan juga kepercayaan para donor. Skandal tersebut hampir memporandakan sistem pengelolaan keuangan dan program donor di Malawi.<sup>19</sup> Kontribusi baru jurnal ini adalah analisis mendalam tentang dampak *Cashgate* pada hubungan pemerintah Malawi dengan mitra pembangunan luar negeri, dan implikasinya kepada pendanaan dan program sektor kesehatan. Jika sebelumnya para peneliti lebih banyak mengkaji *Cashgate* dari sisi yuridis dan pengembalian asetnya, maka jurnal ini memetakan pengaruhnya pada relasi para pemangku kepentingan dan koordinasi program kesehatan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Radha Adhikari, Jeevan Raj Sharma, Pam Smith and Address Malata. "Foreign aid, Cashgate and trusting relationships amongst stakeholders: key factors contributing to (mal) functioning of the Malawian health system." School of Social and Political Science, 2019: 197-205.

<sup>19</sup> Booth D, Cammack D, Harrigan J. "Drivers of Change and Development in Malawi." *Working paper 261, ODI, London.*, 2006: 125-132.

<sup>20</sup> Rowe R, Calnan M. "Trust relation in health care—the new agenda." *European Journal of Public Health*, 2006: 4-6.

Perspektif lain yang ditawarkan jurnal ini juga cukup unik, yaitu pemetaan jaringan sosial-politik dan hubungan kekerabatan kalangan elite Malawi yang ternyata sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan pengelolaan program kesehatan dan bantuan asing di negara itu. Jaringan patronasi ini jarang dieksplorasi sebelumnya dalam konteks Malawi. Pemahaman akan jaringan elite penguasa ini penting untuk bisa memahami dinamika yang terjadi dalam pemerintahan dan sistem kesehatan Malawi. Namun di balik analisis mendalamnya, jurnal ini juga tidak luput dari beberapa kontradiksi. Di satu sisi disebutkan donor kehilangan kepercayaan pasca skandal *Cashgate* dan menarik bantuan yang disalurkan lewat sistem pemerintahan. Tetapi faktanya, para donor tetap berkomitmen memberikan dukungan pembangunan bagi Malawi meski melalui saluran di luar pemerintahan. Jadi seolah masih ada "harapan" dari donor terhadap perbaikan sistem pemerintahan Malawi.

Kontradiksi lainnya terlihat pada tujuan awal desentralisasi *dan Sector Wide Approach* (SWAp) yang sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi program sektor kesehatan dan menghindari duplikasi program. Akan tetapi, duplikasi dan tumpang tindih program masih kerap terjadi justru sebagai akibat dari kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan di Malawi.<sup>21</sup> Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan lebih besar pasca

---

<sup>21</sup> -. *USAID Malawi Health Systems Strengthening Fact Sheet Overview*. Oktober 20, 2015. <https://www.usaid.gov/malawi/fact-sheets/usaaid-malawi-health-systems-strengthening-fact-sheet-2012-13> (Diakses pada tanggal 3 Januari 2024).



desentralisasi untuk melakukan koordinasi, namun tampaknya belum optimal melakukan peran tersebut.

Jurnal lain yang membantu saya dalam penelitian ini adalah *Effective Use of United States Foreign Aid to Fund Infrastructure Projects*, oleh M. Kevin, S. Anoop, Collins Wesley. Bantuan luar negeri adalah salah satu instrumen yang digunakan Amerika Serikat untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global, termasuk di kawasan Amerika Tengah. Artikel ini menganalisis efektivitas bantuan infrastruktur AS di wilayah Northern Triangle Amerika Tengah melalui lembaga USAID dan *US Army Corps of Engineers* (USACE).<sup>22</sup> Meski selama hampir satu dekade terakhir AS telah menyalurkan cukup banyak bantuan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara Amerika Tengah bagian utara tersebut, hasilnya relatif stagnan dan belum signifikan dilihat dari peringkat infrastruktur ketiga negara penerima bantuan.<sup>23</sup> Hal ini tentu kontradiktif dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut. Di sini penulis berupaya melakukan evaluasi mendalam terhadap skema bantuan infrastruktur AS di kawasan *Northern Triangle*. Ini merupakan sudut pandang yang relatif baru dan jarang dilakukan mengingat selama ini kajian

---

<sup>22</sup> M. Kevin, S. Anoop, Collins Wesley. "Effective Use of United States Foreign Aid to Fund Infrastructure Projects." *Proceedings of the Creative Construction e-Conference*, 2020: 63-68.

<sup>23</sup> Lawson, Marian L, and Emily M Morgenstern. "Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy." *Foreign Aid*, 2019: 35-36.

akademik lebih banyak membahas bantuan AS untuk isu ekonomi, perdagangan, dan keamanan.<sup>24</sup>

Analisis dalam artikel ini juga melibatkan peran USACE sebagai salah satu instrumen utama distribusi bantuan infrastruktur AS di luar negeri. Sebagai institusi teknis militer, sebetulnya misi utama USACE adalah menangani pembangunan proyek-proyek pertahanan dan militer AS di luar negeri.<sup>25</sup> Namun kenyataannya USACE juga banyak terlibat dalam proyek infrastruktur sipil untuk pemerintah setempat. Ini menimbulkan pertanyaan apakah koordinasi antara USACE dan USAID sudah berjalan optimal dalam skema bantuan AS saat ini.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang jauh lebih erat antara USACE dan USAID agar skema bantuan infrastruktur AS ke negara-negara Amerika Tengah bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu skema bantuan perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas dan keterampilan teknis lokal serta penyerapan tenaga kerja agar bantuan tidak sekadar membangun infrastruktur fisik, tapi juga mengurangi pengangguran. Temuan jurnal ini menarik untuk dijadikan pembelajaran dalam konteks *Indonesian Aid*, adalah tentang perlunya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait agar bantuan luar negeri infrastruktur Indonesia ke luar negeri bisa efektif dan

---

<sup>24</sup> Ansar, Atif, Bent Flyvbjerg, Alexander Budzier, and Daniel Lunn. "Does Infrastructure Investment Lead to Economic Growth or Economic Fragility? Evidence from China." *Oxford Review of Economic Policy*, 2016: 90-93.

<sup>25</sup> Ahsan, Kamrul, and Indra Gunawan. "Analysis of Cost and Schedule Performance of International Development Projects." *International Journal of Project Management*, 2009: 68-78.

optimal. Juga desain program yang tidak hanya membangun proyek fisik tapi juga peningkatan kapasitas SDM setempat.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana. Dalam membahas bantuan luar negeri, pengertian bantuan luar negeri diartikan oleh sejumlah pakar. Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya *“The Political Economy of International Relations”* yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti dalam bukunya *“International Politics: Framework of Analysis”* mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima.<sup>26</sup>

Secara historis, kebanyakan bantuan luar negeri telah diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor. Terkait dengan kebijakan luar negeri yang memiliki nilai kepentingan (interest)

---

<sup>26</sup> Holsti, K.J. *“International Politics: Framework of Analysis”*. New Jersey: Englewood Cliffs Prentice-Hall, 1995.

negara, maka salah satu bentuk kebijakan itu dapat dituangkan dalam bentuk bantuan luar negeri.<sup>27</sup> Pada masa Perang Dingin, kecenderungan ini sangat umum dilakukan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat maupun Uni Soviet.

Salah satu instrumen penting dalam menghubungkan foreign aid dengan kebijakan luar negeri adalah dengan menggunakan pendekatan Edward. S Manson. Menurut Manson bantuan luar negeri yang dilihat sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri biasanya secara tidak langsung merujuk pada program-program bantuan luar negeri yang dibentuk terutama berdasarkan kepentingan negeri pemberi bantuan. Namun demikian pada hakikatnya hal itu dapat bukan berarti kepentingan negara penerima dapat dikesampingkan. Bantuan luar negeri di posisikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dapat digunakan dalam analisis jika diasumsikan bahwa terdapat kepentingan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima bantuan.<sup>28</sup>

Salah satu bentuk bantuan luar negeri adalah bantuan pembangunan internasional/ODA (Official Development Assistance) adalah jenis bantuan luar negeri khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi negara penerima. Ini adalah ukuran upaya donor, dengan kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai

---

<sup>27</sup> *Politik Bantuan Luar Negeri: Moralitas dalam Dunia Anarki*. Jakarta: Deepublish Publisher, 2020.

<sup>28</sup> Manson., Edward. S. "Foreign Aid and Foreign Policy." *Council of Foreign Policy* (council of Foreign Policy), 1964: 3-5.

tujuan utama mereka. ODA adalah *gold standard* bantuan luar negeri dan tetap menjadi sumber utama pembiayaan untuk bantuan pembangunan. Ini termasuk hibah, pinjaman, dan penyediaan bantuan teknis, dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang stabil yang telah meredam dampak langsung dari krisis keuangan sebelumnya.<sup>29</sup>

Dalam dikursus bantuan luar negeri, terdapat tiga jenis bantuan yang paling umum, antara lain *Official Development Assistance* (ODA), *Official Assistance* (OA), dan *humanitarian assistance*. Klasifikasi ini didasarkan pada empat aspek yakni pihak pemberi bantuan (donor), pihak penerima bantuan, tujuan bantuan, dan dimensi kehidupan yang melatarbelakanginya.<sup>30</sup> OECD mendefinisikan ODA sebagai bantuan pemerintah yang secara khusus ditujukan untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dalam pemberian bantuan, ODA berfokus pada bidang yang menunjang pembangunan negara, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan pengangguran, membangun infrastruktur, dan mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*). ODA juga tidak mengalokasikan dana bantuan untuk bidang-bidang di luar pembangunan seperti bantuan dalam bidang militer, pemeliharaan perdamaian, energi nuklir, dan program-program kebudayaan.

---

<sup>29</sup> Alesina, A., & Dollar, D. "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? ." *Journal of Economic Growth*, 2000: 107-110.

<sup>30</sup> Rosyidin, M. "Foreign policy in changing global politics: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century." *South East Asia Research*, 2017: 21-30.

Distribusi bantuan luar negeri dapat diberikan melalui dua jalur, yaitu secara bilateral dan multilateral. Bantuan bilateral merupakan bantuan luar negeri yang diberikan secara langsung kepada negara penerima. Sedangkan bantuan multilateral adalah bentuk bantuan yang menempatkan lembaga bantuan internasional sebagai penghubung antar negara donor dengan penerima. Contoh bantuan bilateral adalah bantuan yang secara umum diberikan negara melalui lembaga bantuan luar negeri suatu negara, seperti USAID (Amerika Serikat), AusAid (Australia), JICA (Jepang), SIDA (Swedia), dan lain sebagainya. Sedangkan, bantuan multilateral diberikan melalui lembaga penyalur bantuan yang berperan sebagai perantara seperti *Asian Development Bank* (ADB) dan PBB

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah membentuk *Indonesian Aid* untuk mengelola ODA dan kerja sama pembangunan internasional. Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola dana abadi dan biaya operasional, serta investasi, hibah, kemitraan, dan pemantauan dan evaluasi program bantuan. Alokasi ODA Indonesia untuk negara kepulauan Pasifik telah meningkat selama bertahun-tahun, mencerminkan upayanya untuk memperkuat kerja sama pembangunan di kawasan ini, khususnya di sektor-sektor seperti infrastruktur ekonomi, layanan, dan manajemen risiko bencana.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Aryani, M. I., & Hapsari, R. D. "Foreign Aid for Alliance: Indonesia's Effort to Find Support in the South Pacific Region. ." *Journal of Students Academic Research*, 2021: 145-148.

ODA merupakan instrumen penting bagi kerja sama pembangunan internasional Indonesia, yang mencerminkan komitmennya untuk mendukung pembangunan negara-negara penerima, termasuk di kepulauan Pasifik. Berdasarkan jurnal "*Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century*" karya Matthew Dornan dan Jonathan Pryke, dapat disimpulkan bahwa kontribusi bantuan luar negeri terhadap upaya pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara penerima bantuan meliputi beberapa aspek.<sup>32</sup> Pertama, bantuan luar negeri berperan dalam mendanai investasi infrastruktur dan sektor produktif, yang berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, serta pada sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang berkontribusi pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Selain itu, bantuan luar negeri yang ditargetkan pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan juga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin dan indeks. Selain itu, bantuan luar negeri pada sektor infrastruktur dan layanan dasar berdampak pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

### 1.7.2 Emerging Donor

*Emerging donors*, adalah negara-negara yang baru terlibat dalam memberikan bantuan pembangunan, meskipun mereka sendiri masih menerima bantuan. Ini berbeda dengan peran tradisional donor yang dimainkan oleh negara-negara maju yang tergabung dalam *Development Assistance Committee (DAC)* dari *Organisation for Economic Co-operation*

---

<sup>32</sup> Bandyopadhyay, S., & Vermann, E. K. "Donor Motives for Foreign Aid. ." *Federal Reserve Bank of St. Louis REVIEW*, 2013: 87-93.

*and Development* (OECD). Sejarah bantuan luar negeri modern dimulai pada era Perang Dunia II dengan pembentukan *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA), yang didanai terutama oleh Amerika Serikat. Setelah perang, bantuan ini berkembang menjadi program rekonstruksi besar-besaran, seperti Marshall Plan untuk Eropa dan bantuan rekonstruksi untuk Jepang. Seiring berakhirnya kolonialisme dan kemerdekaan negara-negara di Afrika dan Asia, fokus bantuan berubah dari rekonstruksi menjadi pembangunan, dengan negara-negara Eropa turut menjadi donor signifikan bagi bekas koloninya.

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) didirikan, yang kemudian membentuk *Development Assistance Committee* (DAC) sebagai badan utama untuk mengoordinasikan program-program bantuan negara anggotanya. DAC menetapkan standar dan norma untuk bantuan resmi pembangunan, yang harus memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki unsur hibah minimal 25 persen dan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang.<sup>33</sup> OECD dan DAC telah menjadi standar global dalam penyediaan bantuan luar negeri karena keanggotaan mereka yang luas dan kemampuan mereka dalam mengumpulkan data, menetapkan pedoman, dan mempromosikan prinsip-prinsip bantuan yang efektif dan terkoordinasi.

Keanggotaan dalam DAC memberikan legitimasi internasional dan meningkatkan kredibilitas global suatu negara. Anggota DAC dievaluasi

---

<sup>33</sup> Okino, Nabila. "Are The Activities of Aid Donors in Africa ." *Journal of Liberal Arts & Human Sciences*, 2022: 25-31.



untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, melegitimasi gagasan bahwa negara maju harus memiliki program bantuan bilateral. Fenomena *emerging donor*/donor selatan dimulai dari KTT Afro-Asia di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955, dan berkembang menjadi *Non-Alignment Movement* (NAM) dan KSST. Fenomena *emerging donor*/donor selatan dimulai dari KTT Afro-Asia di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955, dan berkembang menjadi *Non-Alignment Movement* (NAM) dan KSST<sup>34</sup> Merujuk pada KSST sebagai bentuk aliansi yang menjadi cikal bakal semangat *emerging donors*, mengemukakan bahwa norma merujuk pada prinsip etis dan moral yang dianut oleh negara-negara yang terlibat pada kerja sama ini.<sup>35</sup>

*Emerging donor* seperti Brazil, India, China, dan Afrika Selatan mengedepankan prinsip solidaritas, kesetaraan, kedaulatan, non-interferensi, non-kondisional, keuntungan bersama, dan kerja sama sukarela, membedakan diri dari donor tradisional. Prinsip-prinsip ini memungkinkan *emerging donors* untuk membedakan diri dari donor tradisional, dengan mengurangi syarat ketat yang biasanya diberikan oleh donor utara, dibandingkan dengan praktik bantuan dari negara Barat yang sering kali disertai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup> *Emerging donors* memainkan peran penting dalam lanskap

---

<sup>34</sup> Graeme Smith, Terence Wesley Smith. *The China Alternative "Changing Regional Order In Pacific Island"*. Australia: ANU Press, 2021.

<sup>35</sup> Hanifa Zama Dinnata, Nuraeni Nuraeni. "Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dalam Implementasi Sustainable Development Goals 2030 oleh ASEAN (2015-2019)." *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2020: 18.

<sup>36</sup> Kharas, Homi. "The Emerging Middle Class in Developing Countries." *OECD Development Centre*, 2010: 23-43

bantuan internasional modern. Mereka tidak hanya berkontribusi pada pembangunan global tetapi juga mencari legitimasi dan pengakuan internasional melalui aktivitas mereka. Dengan mengadaptasi norma *donorship, emerging donors* menunjukkan kapasitas mereka untuk membantu negara lain sekaligus memperkuat posisi mereka sendiri di dunia internasional. Proses ini menunjukkan dinamika kekuasaan global yang berubah dan bagaimana negara-negara berkembang dapat mengukir peran signifikan dalam sistem internasional yang kompleks. Tujuan utama dari emerging donor ada merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan internasional. Menurut Dambisa Moyo, dalam praktik emerging donor mengedepankan efektivitas proyek bantuan dan bentuk serta evaluasi dari bantuan yang diberikan.<sup>37</sup> Secara jelas, *emerging donor* menekankan prinsip *non-interference, mutual respect, dan friendship* dalam memberikan bantuan dan pemberlakuan *non-intervention* pada bantuan luar negerinya, hal ini mengacu pada kebutuhan negara penerima itu sendiri.

1. *Non-Interference*: mengacu pada negara emerging donor yang menghormati kedaulatan negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima
2. *Transparansi*: Prinsip transparansi adalah bentuk upaya meningkatkan efektivitas pembangunan dengan cara meningkatkan prediktabilitas, kerjasama, dan akuntabilitas. Transparansi dalam bantuan juga penting untuk memperkuat tata

---

<sup>37</sup> Parbhoo, Raveena. "The Impact China And Western Donors Have Had On Africa To Ensure The Effectiveness Of Foreign Aid". *Journal of Romanian Literary Studies*, 2023: 881-891.

kelola dan akuntabilitas serta mengurangi risiko korupsi dan pembiayaan ilegal dengan memastikan aliran dana dan tujuannya jelas.

3. *Friendship*: Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya negara donor untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya, terlibat dalam kerja sama Selatan-Selatan dengan negara-negara berkembang, dan secara bersama-sama menanggapi tantangan perubahan iklim.

*Emerging donors* mulai memberikan ODA meskipun masih menerima bantuan, menunjukkan kekuatan ekonomi yang berkembang dan meningkatkan legitimasi reputasi sebagai donor, yang menjadi sumber pengaruh dan status politik di arena global.<sup>38</sup> Adopsi norma *donorship* oleh *emerging donors* mencerminkan keinginan untuk meningkatkan reputasi internasional dan menegaskan diri sebagai negara yang matang dan berkembang.<sup>39</sup> Proses ini mencerminkan keadaan unik, sejarah, dan budaya masing-masing negara, berkontribusi pada transformasi dan perluasan pemahaman tentang *donorship*.<sup>40</sup>

*Emerging donors* cenderung memberikan ODA dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan donor DAC yang sudah mapan. Median ODA sebagai persentase dari GNI untuk *New Donor Country* (NDC) lebih rendah dibandingkan dengan negara anggota DAC yang lebih tua. Namun, NDCs menunjukkan konsistensi dalam memberikan tingkat ODA

---

<sup>38</sup> Okino, Nabila. "Are The Activities of Aid Donors in Africa ." *Journal of Liberal Arts & Human Sciences*, 2022: 25-31.

<sup>39</sup> Andayani, Esti. "Dari Negara Penerima Menjadi Negara Pemberi Bantuan." *Tabloid Diplomasi*, 2009: 4-15.

<sup>40</sup> Bry, S.H. "Brazil's Soft-Power Strategy: The Political Aspirations of South-South Development Cooperation ." *Foreign Policy Analysis*, 2016: 23-43.

yang sama selama periode tertentu. *Emerging donors*, seperti negara-negara Asia Timur, menawarkan pendekatan alternatif terhadap bantuan luar negeri yang berbeda dari model tradisional donor Barat. Menggabungkan bantuan dengan investasi dan perdagangan, fokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi regional, dan mengeksport model pembangunan yang telah terbukti berhasil di negara mereka sendiri.<sup>41</sup> Ini mencerminkan dinamika baru dalam arena bantuan internasional, di mana keberagaman pendekatan diakui dan dipromosikan untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. *Emerging donors*, dengan pendekatan pragmatis dan fleksibel mereka, menawarkan perspektif baru yang dapat memperkaya diskusi global tentang bantuan luar negeri dan pembangunan, serta menantang monopoli tradisional dari donor Barat.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam mengumpulkan data dari sumber ilmiah yang di mana bermaksud untuk memahami isu apa yang dialami oleh subjek penelitian yang bersifat deskriptif di mana dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan fakta yang didapatkan secara lebih rinci dan kemudian diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak

---

<sup>41</sup> Pugu, Melyana Ratana. "Unraveling Indonesia's Diplomacy in the Pacific Region." *International Journal of Social Service and Research*, 2024: 523-534

menggunakan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif.<sup>42</sup> Metode kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis karena menjelaskan terkait peran *Indonesian Aid* terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan kawasan *Pasific Island Country* (PIC) yang didapat melalui sumber yang dapat dipercaya. Jenis penelitian ini dipilih agar penulis lebih leluasa menjelaskan dan menggambarkan signifikansi peran, faktor pendukung dan penghambat dalam perilaku aktor yang dibahas.

### **1.8.2 Batasan Masalah**

Pemberian batas masalah berfungsi untuk menyempitkan penelitian agar lebih jelas, terarah dan fokus kepada pokok permasalahan. Berdasarkan isu permasalahan yang dibahas, penulis membatasi ruang lingkup masalah dengan menetapkan periode pembahasan sejak 2019-2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 *Indonesian Aid* baru dibentuk dan diresmikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Dengan menetapkan batas masalah, indikator yang ada dalam kerangka konsep akan dikaji dengan data yang berada dalam rentang waktu tersebut.

---

<sup>42</sup> Ardianto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif" . 06 Maret 2019. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/MemahamiMetodePenelitianKualitatif.html> (diakses 23 November 2023).

nit dan tingkat Analisis

Unit analisis merupakan sebuah objek atau unit yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, ataupun diramalkan. Unit ini juga disebut sebagai variabel dependen.<sup>43</sup> Penelitian ini mengadopsi individu sebagai unit analisis, di mana dalam pembuatan keputusan negara tidak lepas dari otoritas yang menyertai individu, yaitu perdana menteri atau presiden.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah perilaku Indonesia melalui *Indonesian Aid*, unit eksplanasinya adalah negara-negara kepulauan Pasifik yang mempengaruhi perilaku Indonesia. Tingkat analisis dari penelitian ini adalah tingkat regional/kawasan (sub-international level) dalam hal ini merujuk pada kawasan Asia-Pasifik. Hal ini dikarenakan terdapat interaksi antara Indonesia sebagai pemberi bantuan luar negeri dengan negara-negara penerima bantuan di kepulauan Pasifik serta dengan negara donor lain yang andil di negara kepulauan Pasifik. Interaksi yang dimaksud berupa pemberian bantuan oleh Indonesia kepada negara-negara Pasifik Selatan melalui lembaga *Indonesian Aid*.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik Analisa data yang berdasarkan Miles dan Huberman di mana kegiatan dalam Analisis data dibagi menjadi tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Mas' oed, Mochtar. "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi". Jakarta: LP3ES, 1990.

<sup>44</sup> Stein, Janice Gross. *Threat Perception in International Relations*. Inggris: The Oxford Handbook of Political Psychology, 2013.

<sup>45</sup> Silalahi., Ulber. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

## 1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan atas data yang didapat yang mana akan terjadi secara terus-menerus ketika penelitian sedang berlangsung. Dari data kasar yang didapat tersebut akan dilakukan proses peringkasan dan membentuk data menjadi data yang dapat mendukung untuk menjelaskan secara mendalam terkait hubungan antar variabel.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian yang mana memaparkan sejumlah data maupun informasi yang sudah direduksi pada tahap sebelumnya. Nantinya data ini menjadi data yang akan digunakan dan disajikan dalam proses pencarian hasil sebagai syarat untuk memasuki tahap / alur selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data dilakukan yang mana menjadi bagian pembahasan dalam penelitian, peneliti akan berupaya untuk mencari suatu benang merah antara data yang didapatkan dan hubungannya dari variabel yang dihubungkan. Penarikan kesimpulan akan didasarkan pada data-data yang peneliti sudah olah pada bagian sebelumnya sehingga kesimpulan dapat merepresentasikan seluruh penelitian secara singkat.

### 1.9 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 merupakan bab yang menjadi Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan Batasan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, studi literatur, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA PASIFIK SELATAN**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan, tantangan serta rencana kerja sama yang pernah dan akan dibuat oleh kedua belah pihak.

## **BAB III KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL INDONESIA DI NEGARA PASIFIK SELATAN**

Bab 2 yang merupakan bab yang akan menyajikan mengenai bidang dan bentuk program bantuan yang sudah dilaksanakan *Indonesia-Aid* di Pasifik Selatan sejak lembaga ini berdiri. Pemaparan data-data dalam meninjau bantuan internasional yang pernah diberikan oleh Indonesia ke negara lain baik sebelum dibentuknya *Indonesia-Aid* maupun bantuan yang sudah diberikan oleh *Indonesia-Aid*, selain itu data-data terkait *Indonesia-Aid* juga akan dijelaskan di dalam bab ini.

## **BAB IV ANALISA UPAYA PENGUATAN HUBUNGAN INDONESIA-PASIFIK SELATAN MELALUI *INDONESIAN AID***

Bab ini akan membahas upaya penguatan hubungan kerja sama Indonesia-Pasifik Selatan melalui *Indonesian Aid* dan menilai upaya, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk mengoptimalkan peran Indonesia sebagai emerging donor.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan